

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Aksi kolektif masyarakat melawan kebijakan kenaikan PBB-P2 tidak hanya terjadi karena soal perekonomian, tetapi juga disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan politik yang saling terkait. Kenaikan PBB-P2 dianggap sebagai ketidakadilan dalam kebijakan fiskal, terutama bagi masyarakat pedesaan, para petani, dan pengusaha kecil yang tidak merasakan peningkatan pendapatan yang sebanding. Selain itu, kurangnya penyampaian informasi secara baik dan tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan PBB-P2 dianggap sebagai hasil dari birokrasi yang bersifat elitis. Dengan solidaritas sosial dan identitas komunitas lokal yang sangat kuat, upaya aksi kolektif mampu digerakkan dengan jaringan sosial, tokoh masyarakat, media sosial serta organisasi lokal berperan mengadvokasi sebagai sarana untuk menguatkan upaya penentangan.

Respon pemerintah terhadap aksi kolektif masyarakat cenderung bersifat defensif dan tidak dilengkapi dengan pendekatan dialog yang cukup baik. Pola respon ini pada akhirnya memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menciptakan konflik yang semakin memburuk. Peran DPRD Kabupaten dengan membentuk Panitia Khusus Hak Angket, cukup memberikan tekanan kepada Pemerintah Kabupaten dan mampu menjadi saluran penyampaian harapan dan kritik dari masyarakat. Kondisi kesamaan kepentingan dan ketidakadilan yang dirasakan secara sosiologis memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di kalangan masyarakat. Secara politik, konflik tersebut mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan memberi pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Keberhasilan penghapusan kebijakan kenaikan pajak PBB-P2 menunjukkan bahwa tekanan kolektif dari masyarakat dapat mengubah arah kebijakan publik. Hingga mampu melemahkan posisi politik kepala daerah hingga melengserkan dari posisinya.

7.2 Manfaat Penelitian

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya studi Ilmu Politik, terutama pada bidang studi politik lokal, pembuatan kebijakan publik dan gerakan sosial. Penelitian ini membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana masyarakat bereaksi secara kolektif terhadap kebijakan fiskal daerah, serta memperluas pembahasan mengenai hubungan antara legitimasi politik, keterlibatan publik dan stabilitas pemerintahan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya yang ingin mempelajari konflik dalam kebijakan publik serta mengenai gerakan sosial politik baru.

Secara empirik, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam membuat kebijakan publik yang lebih melibatkan masyarakat, transparansi, terbuka dan berkeadilan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, LSM dan organisasi lokal, untuk memperkuat cara-cara advokasi dan dialog dalam menyelesaikan masalah terkait kebijakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih paham akan pentingnya keikutsertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan di tingkat daerah.

